

# Amanda Amanda

## Artikel Amanda

-  Prodi Akuntansi
-  Fak. Ekonomi dan Bisnis
-  LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III

---

### Document Details

**Submission ID**

trn:oid::1:3147336591

**Submission Date**

Feb 6, 2025, 10:14 AM GMT+7

**Download Date**

Feb 6, 2025, 10:24 AM GMT+7

**File Name**

perbaikan\_fiks\_riset\_amanda\_-\_Amanda.docx

**File Size**

443.7 KB

**18 Pages****4,822 Words****33,688 Characters**

# 13% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Small Matches (less than 12 words)

---

## Top Sources

- 13%  Internet sources
- 6%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

---

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 13% Internet sources
- 6% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

<b>1</b>	Internet	
	media.neliti.com	2%
<b>2</b>	Internet	
	journal.unimma.ac.id	<1%
<b>3</b>	Internet	
	ejournal.unib.ac.id	<1%
<b>4</b>	Internet	
	www.ejurnal.unisri.ac.id	<1%
<b>5</b>	Internet	
	anzdoc.com	<1%
<b>6</b>	Internet	
	wisuda.unissula.ac.id	<1%
<b>7</b>	Internet	
	eprints.ums.ac.id	<1%
<b>8</b>	Publication	
	Rismawati Rismawati, Fajar DAP, Muh Ade Rachman. "Pengaruh Pendidikan Kebe...	<1%
<b>9</b>	Internet	
	jurnal.widyagama.ac.id	<1%
<b>10</b>	Internet	
	ojs.uho.ac.id	<1%
<b>11</b>	Internet	
	jurnal.polinela.ac.id	<1%

12	Internet	publikasi.dinus.ac.id	<1%
13	Internet	erepo.unud.ac.id	<1%
14	Internet	opac.uad.ac.id	<1%
15	Internet	123dok.com	<1%
16	Internet	lib.unnes.ac.id	<1%
17	Internet	repositori.unsil.ac.id	<1%
18	Internet	repository.ibs.ac.id	<1%
19	Internet	id.scribd.com	<1%
20	Internet	jurnal.ustjogja.ac.id	<1%
21	Internet	repository.trisakti.ac.id	<1%
22	Internet	repository.unpas.ac.id	<1%
23	Publication	Novel Hiskya Kambey, Treesje Runtu, Lidia M. Mawikere. "Evaluasi penerapan bel...	<1%
24	Internet	docplayer.info	<1%
25	Internet	download.garuda.ristekdikti.go.id	<1%

26	Internet	eprints.binadarma.ac.id	<1%
27	Internet	es.scribd.com	<1%
28	Internet	jmas.unbari.ac.id	<1%
29	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
30	Internet	yusranlapananda.wordpress.com	<1%

**DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(STUDI PADA PEMERINTAH KOTA PALOPO)**



**PENELITIAN**

**Oleh :**

**AMANDA (211130049)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO  
2024**

# DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA PALOPO)

Amanda<sup>1</sup>, Halim Usman<sup>2,3</sup>, Andika Rusli<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo

Email : @amndsky0@gmail.com @umpalopo.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dengan lokasi penelitian di Kota Palopo. Respondensi melibatkan dua kelompok: masyarakat yang sebelumnya berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat RT/RW dan pejabat BPKAD (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palopo. Proses pengambilan sampel menghasilkan total 80 responden. Kuesioner disusun untuk survei dan disampaikan kepada responden dengan menggunakan skala Likert. Analisis data dilakukan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan pengawasan internal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif dalam hal yang sama.

**Kata Kunci:** partisipasi masyarakat, pengawasan internal, akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah Kota Palopo.

## Abstract

This research aims to analyze the influence of community participation and internal control on regional financial management accountability. The method used is quantitative, with the research location in Palopo City. The response involved two groups: the community who previously participated in development planning deliberations at the RT/RW level and BPKAD (PNS) officials within the Palopo City Government. The sampling process resulted in a total of 80 respondents. Questionnaires were prepared for surveys and delivered to respondents using a Likert scale. Data analysis was carried out using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 30. The research results show that community participation has a significant and positive influence on regional financial management accountability, while internal supervision also shows a significant and positive influence in the same matter.

**Keywords:** community participation, internal supervision, accountability, regional financial management in Palopo City.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu elemen krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Akuntabilitas sendiri sangat esensial karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan mereka secara bijaksana. Pemerintah Kota Palopo telah mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aturan pentingnya adalah Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2020. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga menekankan peranan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2014 menunjukkan bahwa Kota Palopo menerima sertifikat wajar dengan pengecualian (WDP) akibat adanya beberapa permasalahan dalam laporan keuangan tahunan. Pernyataan ini menjadi tonggak awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan. Sejak saat itu, Kota Palopo berhasil secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2015 hingga 2023. Ini menandakan bahwa laporan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintah dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian ini menggambarkan skomitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memenuhi harapan masyarakat akan pengelolaan sumber daya publik yang lebih baik.

Namun, di balik pencapaian tersebut, pengelolaan keuangan di Kota Palopo masih menghadapi tantangan dalam memenuhi tingkat akuntabilitas yang diharapkan. Terdapat sejumlah permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan yang memerlukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas. Salah satu contohnya adalah dugaan penyalahgunaan dana anggaran RSUD Sawerigading pada tahun 2024. Penelusuran yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palopo menemukan bukti kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban rumah sakit untuk periode anggaran 2021-2023.

Salah satu aspek yang berperan penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya dapat meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas. Faktor ini memengaruhi keberhasilan program-program pembangunan dan pengembangan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam tiap tahap pengambilan keputusan, termasuk dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada, kita dapat memastikan bahwa setiap inisiatif pembangunan berjalan dengan lebih efektif. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, setiap usaha pembangunan berpotensi tidak mencapai hasil yang diharapkan (Atiningsih & Ningtyas 2019).

Pentingnya partisipasi masyarakat terletak pada perlunya membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang vital. Ketika masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan, mereka akan lebih memperhatikan penggunaan dana publik dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Dengan demikian, terciptalah lingkungan di mana pemerintah merasa lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Akuntabilitas menjadi sangat penting karena masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola dan digunakan. Masyarakat, sebagai pemangku kepentingan utama, seharusnya diprioritaskan dalam pelaksanaan kebijakan organisasi publik. Khususnya dalam konteks pembangunan di desa, keterlibatan masyarakat memastikan bahwa proses pembangunan berjalan tepat sasaran, efisien, dan efektif (Wafirotin *et al.*, 2019).

Sebaliknya, pengawasan internal sangat penting untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah. Pengawasan internal yang efektif memungkinkan pengelolaan anggaran yang tepat dan mengidentifikasi penyimpangan dengan cepat. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan internal mencakup semua proses pemeriksaan, peninjauan, evaluasi, pemantauan, serta

kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi organisasi. Untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola yang baik, ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa operasional dijalankan secara efisien dan efektif sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Menurut (Rahman 2020), Pengawasan internal yang efektif berfungsi untuk meminimalkan risiko kecurangan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Penelitian oleh (Ahmad & Firmada 2020) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan internal yang baik tidak hanya berperan dalam pencegahan penyimpangan, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada publik.

Penelitian (Syahril *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa audit internal yang efektif dapat meningkatkan keandalan sistem pengendalian internal dalam institusi pendidikan. Audit internal tidak hanya mencegah penyimpangan, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain itu, (Rusli 2024) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal berbasis risiko dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko yang memengaruhi kinerja. Hal ini mendukung pentingnya pengawasan internal yang tidak hanya fokus pada kepatuhan, tetapi juga pada pencegahan risiko dan peningkatan kualitas informasi keuangan.

Penelitian sebelumnya oleh (Periansya & Sofyan 2020) berjudul "Dampak Kompetensi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Banyuasin" menjadi dasar dari penelitian ini. Terdapat beberapa perbedaan antara studi ini dan studi sebelumnya. Pertama, penelitian ini dilakukan di Kota Palopo, sementara penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Rambutan Banyuasin. Kedua, dalam penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan dua variabel independen, yaitu kompetensi dan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dan pengawasan internal akan menjadi lebih penting.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dan pengawasan internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Judul penelitian adalah "**Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pemerintah pada Kota Palopo)**", menurut penjelasan tersebut.

## Tinjauan Pustaka dan Hubungan Hipotesis

### Teori Stewardship

*Teori stewardship* menggarisbawahi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya demi mencapai tujuan yang berpihak pada masyarakat (Donaldson *et al.*, 1991). Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah berpegang pada kepentingan organisasi, bukan kepentingan individu. Fondasi teori ini terletak pada pandangan filosofi mengenai hakikat manusia, yang menganggap bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah

1 dipandang sebagai entitas yang berupaya untuk bertindak demi kebaikan bersama (Kaihatu, 2006).

Implikasi dari teori ini menggambarkan keberadaan pemerintah daerah sebagai organisasi publik yang dapat diandalkan dan dipercaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan cara ini, diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat (Budiana, 2019).

### Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna jasa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Keberhasilan pengelolaan ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat, yang merupakan elemen integral dari sistem pemerintahan. Semakin besar keterlibatan masyarakat, semakin tinggi pula akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2 Temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di daerah pedesaan masih sangat penting, meskipun penelitian ini fokus pada wilayah perkotaan. (Periansya & Sofyan 2020) melakukan penelitian yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin aktif masyarakat terlibat dalam masalah keuangan desa, semakin akuntabilitas pengelolaan dana tersebut. Studi lain, seperti Watu *et al.* (2023), Aulia *et al.* (2018), Jannah *et al.* (2018), dan Jaya (2019), secara konsisten menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, kita dapat membuat hipotesis yang relevan.

**H1 : partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah**

### Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh aparat di dalam organisasi itu sendiri, bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan pemerintahan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini berfungsi untuk mengukur, mengarahkan, dan memantau aktivitas manajemen serta seluruh pegawai, memberikan kepastian yang memadai. Dengan demikian, semakin efektif pengendalian internal yang diterapkan pemerintah, semakin baik pula pencapaian tujuan yang diharapkan secara efisien (Sari, 2017).

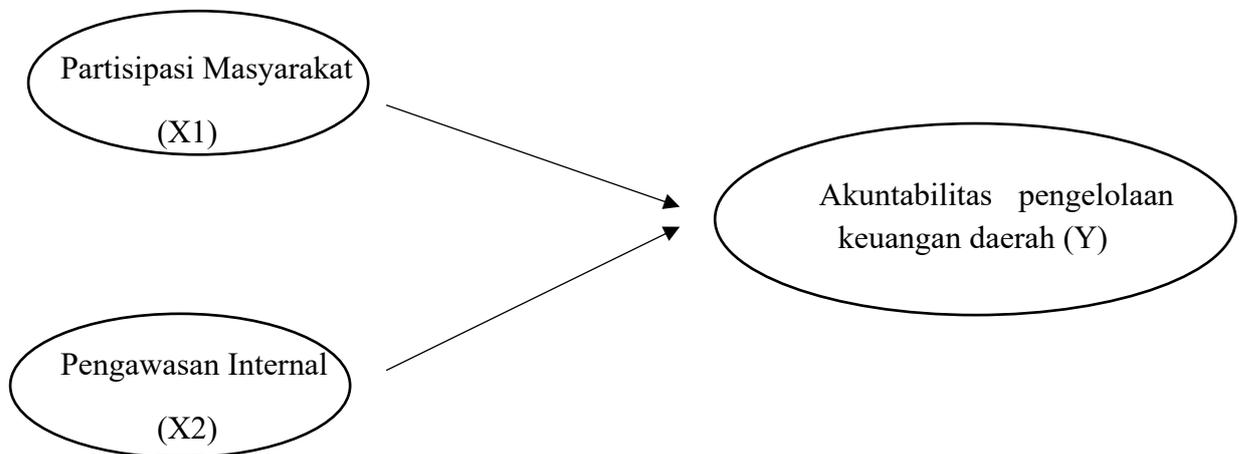
9 Walaupun penelitian ini berfokus pada konteks kota, terdapat relevansi signifikan dengan penelitian sebelumnya di desa yang dilakukan oleh Amalia (2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa aparat pengawasan internal pemerintah memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rozi *et al.* (2017), Hanafiah *et al.* (2017), dan Dri Asmawanti-S (2022), yang mengindikasikan bahwa pengawasan internal berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari sejumlah penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal merupakan fungsi manajemen yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang lebih baik akan mengurangi jumlah kesalahan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

## H2 : Pengawasan Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

### Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini merujuk pada kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik. Aspek ini mencakup transparansi dalam pelaporan keuangan dan efektivitas dalam mencapai tujuan pembangunan (Rosidah, 2023). Akuntabilitas tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan serta tindakan yang diambil. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas melibatkan berbagai aspek seperti penyusunan laporan keuangan yang akurat, pengendalian internal yang efisien, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Viyurintina, 2024).

### Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka berfikir

## METODE PENELITIAN

### Jenis penelitian

Penelitian kuantitatif berbasis pada positivisme dan bertujuan untuk menganalisis populasi atau sampel tertentu. Metode pengambilan sampel acak umumnya digunakan dalam jenis penelitian ini, dan analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif atau statistik. Hipotesis yang telah dibuat sebelumnya diuji sebagai tujuan utama dari penelitian ini (Sugiyono, 2020:16). Menurut filsafat positivisme, realitas, gejala, atau fenomena dapat dikategorikan secara tetap, spesifik, terukur, dan berdasarkan hubungan sebab-akibat.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok responden. Pertama, masyarakat yang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat RT/RW. Jumlah pastinya belum dapat ditentukan karena tidak adanya data mengenai jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat RT/RW. Responden dalam kelompok ini dipilih melalui purposive sampling, yaitu dengan

memilih individu yang memenuhi kriteria pernah terlibat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat RT/RW. Kedua, pejabat yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Menurut Sugiyono (2019:127), sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan. Ketika populasi terlalu besar untuk diteliti sepenuhnya, misalnya karena keterbatasan sumber daya, tenaga, atau waktu, peneliti dapat menggunakan sampel sebagai alternatif. Dalam penelitian ini, karena ukuran populasi tidak diketahui dan sampel dipilih secara purposive, metode nonprobabilitas digunakan. Penelitian ini melibatkan 80 responden, terdiri dari 30 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo dan 50 anggota masyarakat yang pernah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Palopo.

### Sumber dan metode pengumpulan data

Untuk penelitian ini, kuesioner dibagikan kepada masyarakat umum dan staf BPKAD Palopo. Metode purposive sampling, yang merupakan pendekatan non-probabilitas, memungkinkan peneliti untuk memilih sampel berdasarkan standar yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dikumpulkan menggunakan skala Likert lima poin, dengan nilai berikut: sangat setuju (SS=5), setuju (S=4), netral (N=3), tidak setuju (TS=2), dan sangat tidak setuju (STS=1).

### Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini melibatkan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen berfungsi sebagai pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, variabel dependen yang diteliti adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Sementara itu, variabel independen yang berperan dalam penelitian ini terdiri dari partisipasi masyarakat (X1) dan pengawasan internal (X2). Dengan demikian, variabel dependen merupakan hasil atau konsekuensi dari adanya variabel independen tersebut.

**Tabel 1. Operasional variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator	Referensi
1	Partisipasi Masyarakat (X1)	Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahap proses pembangunan. Mereka menekankan bahwa partisipasi bukan hanya sekadar keikutsertaan dalam pelaksanaan program, tetapi juga mencakup pengidentifikasian	-Keterlibatan dalam pengambilan keputusan:  -Keterlibatan dalam pelaksanaan program:	Periansya & Sopiyan AR (2020)

		masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan solusi, dan evaluasi hasil dari kegiatan pembangunan tersebut.		
2	Pengawasan Internal	Pengawasan internal merupakan bagian penting dari manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi, serta mendukung pencapaian tujuan secara keseluruhan.	-Evaluasi dan audit pengelolaan keuangan  -Sistem pengendalian internal	Amalia et al (2024)
3	Akuntabiliitas pengelolaan keuangan Daerah	Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan, kinerja, dan hasil yang dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.	-Transparansi pengelolaan keuangan  -pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Periansya & Sopiyan AR (2020)

## Metode Analisis Data

Untuk mengumpulkan data, metode analisis linier berganda digunakan, dan program SPSS digunakan untuk melakukannya. Analisis statistik deskriptif dan pengumpulan kuesioner yang disebarakan adalah beberapa langkah dalam proses ini. Sebelum memulai regresi, model regresi harus dibersihkan dari asumsi klasik, yang dapat diuji dengan normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

Dalam analisis ini, tingkat signifikansi ditetapkan pada 5%. Multikolinearitas tidak akan terjadi jika nilai toleransi melebihi 0,10 atau faktor inflasi variansi kurang dari 10. Sebaliknya, nilai signifikansi absolute residual harus lebih besar dari 0,05 untuk memastikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Selain itu, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda, uji t, dan uji F. Persamaan yang digunakan untuk analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

$Y$  = Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$  = koefisien Regresi

$X1$  = partisipasi masyarakat

$X2$  = pengawasan internal

$e$  = Error

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Statistik Deskriptif

#### Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 menyajikan hasil analisis statistik deskriptif yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai data penelitian. Analisis ini mencakup informasi mengenai nilai rata-rata (mean), nilai maksimum (max), nilai minimum (min), serta standar deviasi untuk setiap variabel yang diteliti, yaitu Partisipasi Masyarakat (X1), Pengawasan Internal (X2), dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Partispasi masyarakat (X1)	80	10.00	34.00	25.8500	4.05063
Pengawasan internal (X2)	80	7.00	35.00	26.9750	4.57283
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	80	7.00	35.00	26.7125	4.50371
Valid N (Listwise)	80				

Sumber Data Primer diolah dengan SPSS Ver.30

Analisis deskriptif memberikan gambaran yang jelas tentang sebaran data yang digunakan dalam penelitian, berdasarkan hasil yang tertera pada tabel di atas. Skor rata-rata menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan adalah 25,8500, sedangkan untuk pengawasan internal, skor rata-rata tercatat sebesar 26,9750. Di sisi lain, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki skor rata-rata 26,7125. Standar deviasi untuk ketiga variabel menunjukkan konsistensi data yang baik, tanpa adanya deviasi yang signifikan dari rata-rata. Namun, nilai standar deviasi tertinggi terdapat pada variabel "Pengawasan Internal" (4,57283), yang mengindikasikan perbedaan yang mencolok dalam tingkat pengendalian internal di antara para responden.

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item pernyataan	R hitung	R Tabel	Status
Partisipasi Masyarakat (X1)	X1	0.628	0.220	Valid
	X2	0.535	0.220	Valid
	X3	0.639	0.220	Valid
	X4	0.721	0.220	Valid
	X5	0.746	0.220	Valid
	X6	0.683	0.220	Valid
	X7	0.609	0.220	Valid
Pengawasan Internal (X2)	X1	0.611	0.220	Valid
	X2	0.690	0.220	Valid
	X3	0.706	0.220	Valid
	X4	0.695	0.220	Valid
	X5	0.665	0.220	Valid
	X6	0.644	0.220	Valid
	X7	0.732	0.220	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Y1	0.684	0.220	Valid
	Y2	0.613	0.220	Valid
	Y3	0.797	0.220	Valid
	Y4	0.655	0.220	Valid
	Y5	0.604	0.220	Valid
	Y6	0.636	0.220	Valid
	Y7	0.592	0.220	Valid

Sumber Data Primer diolah dengan SPSS Ver.30

Semua item di atas valid, seperti yang ditunjukkan oleh tabel di atas, karena nilai Rhitung lebih besar dari Rtabel berdasarkan uji signifikan 0.05.

Uji Realibilitas

Tabel. 4 Realibilitas Variabel penelitian

V ariabel	Cronbach 's Alpha	Keterangan	N of Items
Partisipasi Masyarakat (X1)	0.768	0,60 (Reliabel)	7
Pengawasan Internal (X2)	0.803	0,60 (Reliabel)	7
Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah (Y)	0.773	0,60 (Reliabel)	7

Sumber Data Primer diolah dengan SPSS Ver.30

1

Tabel 4 menunjukkan bahwa semua item pernyataan kuesioner dari setiap variabel memiliki nilai *Cronbach 's Alpha* lebih dari 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item variabel kuesioner dinyatakan reliabel.

11

**Uji asumsi klasik**  
**Uji Normalitas**

**Tabel 5. Normalitas**

Kolmogorov-Smirnov	Unstandardized Residual
N	80
Asymp.Sig.(2-tailed)	0.200

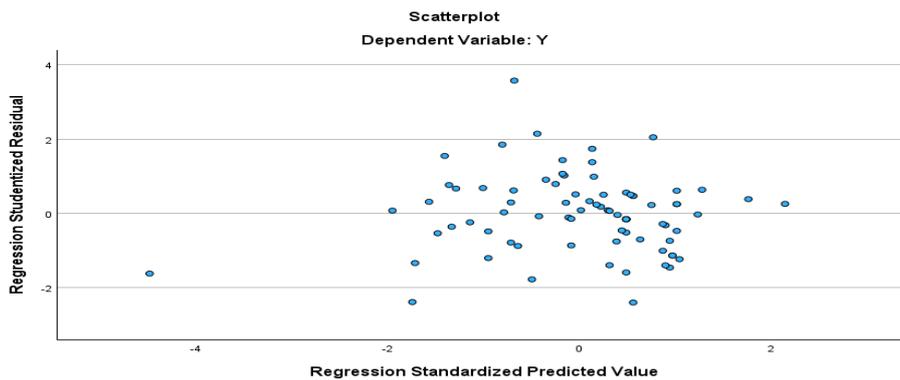
Sumber Data Primer diolah dengan SPSS Ver.30

8

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0.200 melebihi tingkat signifikansi 0,05, yang menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Pada tabel diatas bahwa tidak ada masalah heteroskdastisitas dalam model regresi, seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji Glejser dan pemeriksaan scatterplot. Variasi residual, yang tampaknya konstan atau homoskedastis, mendukung validitas analisis regresi yang dilakukan.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel.6 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF(Variance Inflation Factor)
Partisipasi masyarakat (X1)	0.998	1.002
Pengawasan internal (X2)	0.998	1.002

Sumber Data Primer diolah dengan SPSS Ver.30

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen; nilai Tolance untuk kedua variabel (X1 dan X2) adalah 0.998, dan

nilai VIF adalah 1.002. Dengan demikian, model regresi dapat digunakan tanpa masalah multikolinearitas.

## Uji Hipotesis

### Regresi Linear Berganda

**Tabel 7. Hasil uji regresi linear berganda**

$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$			
	Coefficient	t-statistic	sig
Konstanta	2.253	1.010	0.316
X1	0.677	7.151	<0.001
X2	0.258	3.082	0.003

N = 80  
 $R^2 = 0.619$   
 Adj.  $R^2 = 0,609$   
 F-Statistic = 62.44    Sig. = < 0.001<sup>b</sup>  
 Variabel Dependen Adalah Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan variabel independen adalah Partisipasi masyarakat dan pengawasan internal.  
 \* signifikansi pada  $\alpha = 0.05$   
 X1 adalah Partisipasi masyarakat, X2 adalah Pengawasan internal dan Y adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat (X1) memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan koefisien sebesar 0,677. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit pada partisipasi masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,677, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Selain itu, pengawasan internal (X2) juga memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas, meskipun kontribusinya lebih kecil dengan koefisien 0,258 dan nilai BETA 0,262. Artinya, peningkatan satu unit pada pengawasan internal dapat meningkatkan akuntabilitas sebesar 0,258.

Kedua variabel tersebut signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99% (nilai Sig < 0,05), dengan nilai Sig untuk partisipasi masyarakat < 0,001 dan untuk pengawasan internal sebesar 0,003. Namun, konstanta sebesar 2,253 tidak signifikan (Sig = 0,316), yang menunjukkan bahwa tanpa kontribusi partisipasi masyarakat dan pengawasan internal, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dijelaskan secara memadai.

### Hasil Uji T

Dari hasil uji T, variabel partisipasi masyarakat (X1) memiliki nilai t sebesar 7,151 dengan tingkat signifikansi < 0,001, yang berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05 (5%). Dengan nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel ( $7,151 > 1,991$ ), hipotesis H1 diterima: Ini mengonfirmasi bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, variabel pengawasan internal (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 3,082 dengan

tingkat signifikansi 0.003. Karena nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $3,082 > 1,991$ ), hipotesis  $H_2$  juga diterima : yang berarti pengawasan internal memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas.

### **Hasil Uji F**

Hasil uji F menunjukkan nilai sebesar 62,44 dengan tingkat signifikansi 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan pengawasan internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Nilai  $R^2$  sebesar 0,619 menunjukkan bahwa 61,9% variasi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh partisipasi masyarakat dan pengawasan internal. Sisanya, yaitu 38,1%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Adjusted  $R^2$  yang bernilai 0,609 memberikan estimasi yang lebih akurat karena mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menjelaskan variasi dalam data.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah**

Berdasarkan hasil penelitian, variabel partisipasi masyarakat ( $X_1$ ) menunjukkan nilai sebesar 7,151 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,001. Nilai ini jauh di bawah ambang batas signifikansi 0,05 dan melebihi nilai kritis 1,991. Temuan ini menguatkan penerimaan hipotesis pertama, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator pengelolaan anggaran publik yang transparan dan terbuka, sekaligus mendukung teori stewardship. Menurut teori ini, steward bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya demi kepentingan masyarakat sebagai pemilik utama. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, hubungan saling percaya antara pengelola dan masyarakat dapat terbentuk, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat akuntabilitas.

Partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan aktif dalam berbagai tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pada tahap perencanaan, masyarakat dapat berkontribusi melalui musyawarah atau forum diskusi untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas yang sesuai dengan kondisi daerah mereka. Mereka juga dapat dilibatkan dalam penyusunan program melalui survei atau konsultasi yang dilakukan secara terbuka.

Pada tahap pelaksanaan, masyarakat berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan program agar sesuai dengan anggaran dan rencana yang telah ditentukan. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan program, misalnya dengan ikut serta dalam kegiatan gotong royong atau bentuk kerja sama lain yang mendukung pembangunan.

Tahap evaluasi juga menjadi momen penting bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik atas pelaksanaan program. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui forum transparansi anggaran, di mana mereka dapat menilai laporan keuangan dan memberikan masukan atas hasil yang telah dicapai. Selain itu, audit sosial yang melibatkan masyarakat dapat dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan dana sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah menjadikan proses tersebut lebih transparan, jelas, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Sebagai contoh, masyarakat dapat mengusulkan kebutuhan mereka dalam forum Musrenbang, memantau pelaksanaan proyek pembangunan, dan mengevaluasi laporan keuangan melalui diskusi publik.

Penelitian terdahulu oleh (Periansya & Sofyan 2020) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, semakin besar pula partisipasi masyarakat yang dilibatkan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menjadikan pengelolaan keuangan daerah lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

### **Pengaruh Pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah**

20 Dengan tingkat signifikansi 0.003, variabel pengawasan internal (X<sub>2</sub>) menunjukkan nilai sebesar 3,082, yang lebih besar dari nilai t tabel dan di bawah batas signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima, yang menyatakan bahwa pengawasan internal memiliki efek yang baik dan besar terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan internal yang efektif merupakan elemen krusial dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem pengendalian internal yang baik, kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dapat dideteksi lebih awal, sehingga perbaikan dapat dilakukan dengan segera. Selain itu, pengawasan internal memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip tata kelola yang baik.

Temuan ini sejalan dengan *teori stewardship*, yang menegaskan bahwa pengelola sumber daya memiliki tanggung jawab untuk mengelola kepercayaan yang diberikan oleh pemilik sumber daya dengan penuh profesionalisme dan integritas. Dalam konteks ini, pengawasan internal yang kuat merupakan wujud tanggung jawab manajemen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya pengawasan internal yang independen dan profesional, setiap langkah dalam pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang ada.

2 Penelitian ini juga mendukung temuan sebelumnya oleh Amaliah (2024), yang menunjukkan bahwa pengawasan internal memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas

dalam pengelolaan dana desa, semakin besar pula pengaruh dari pemantauan internal yang diterapkan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah berperan penting dalam meningkatkan transparansi, memperkuat hubungan saling percaya, serta memastikan pengelolaan keuangan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan *teori stewardship*, yang menekankan pentingnya tanggung jawab pengelola untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya demi kepentingan publik.

Di sisi lain, pengawasan internal juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah. Pengawasan yang efektif berfungsi untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Dalam konteks *teori stewardship*, pengawasan internal dapat dipandang sebagai manifestasi tanggung jawab manajer dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan pengawasan internal merupakan dua elemen krusial dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Kota Palopo. Penguatan kedua aspek ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

## Saran

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Palopo, diperlukan upaya untuk melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini bisa dilakukan melalui forum diskusi publik, Musrenbang, serta sosialisasi program secara terbuka. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi terkait pentingnya akuntabilitas, agar mereka lebih sadar dan terlibat dalam proses pengelolaan keuangan. Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi digital, juga dapat mempermudah akses informasi dan memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Pengawasan internal juga perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan kepada auditor dan menerapkan sistem pengendalian berbasis teknologi, seperti e-audit. Independensi pengawasan harus dijaga agar proses pengawasan berjalan objektif dan bebas dari tekanan. Mekanisme pelaporan masyarakat yang aman dan transparan juga dapat membantu mendukung pengawasan ini.

Penerapan prinsip *stewardship*, yang menekankan tanggung jawab pengelola untuk kepentingan masyarakat, harus menjadi prioritas. Dengan demikian, pemerintah dapat mengelola sumber daya secara optimal, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini juga membuka peluang untuk studi lanjutan di daerah lain dengan memperluas variabel, seperti budaya

organisasi dan penerapan teknologi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. :, & Firmanda, H. (2020). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kinerja karyawan dalam perspektif ekonomi islam (Studi Pada PT BPRS Bandar Lampung) *skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi (S.E) Oleh.*
- Amalia, L. , H. R. R. , & N. K. (2024). Pengaruh sistem informasi akuntansi, peran perangkat desa, dan aparatur pengawasan internal pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh.
- Atiningsih dan Ningtyas (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi tanggung jawab manajemen Dana Desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal pada tanggung jawab manajemen Dana Desa.
- Budiana, I. M. (2019). Employee engagement: implikasi praktik manajemen sumber daya manusia (studi kasus pada pt. Aci) (doctoral dissertation, universitas negeri jakarta).
- Donaldson, L., Davis, J. H., Argyris, C., Chandler, A., Etzioni, A., Hage, J., McCloskey, D., Olson, M., Perrow, C., Tricker, R., & Whetten, D. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. In *Australian Journal of Management* (Vol. 16).
- Dri Asmawanti-S, G. H. N. S. V. F. (2022). Persepsi penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Erikha Viyurintina, E. S. (2024). Good governance dan kualitas laporan keuangan pemerintah. <https://doi.org/10.62281>
- Jannah, R., Handajani, L., & Firmansyah, M. (2018). The Influence of Human Resources, Use of Information Technology and Public Participation to the Transparency and Accountability of Village Financial Management. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 6(05). <https://doi.org/10.18535/ijsrcm/v6i5.em03>
- Jaya, I. M. L. M. (2019). Determinan akuntabilitas keuangan dana desa pasca penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014. *Jurnal Akuntansi*, 9(3), 201–218. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.201-218>
- kaihatu. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia.
- Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun. (2019). Pres i den republik indonesia-2.
- Peraturan walikota Palopo Nomor 12 Tahun 2021. (n.d.). *Batang-Tubuh-&-Ringkasan-Perda-APBD-TA.2024.*
- Periansya, P. , & A. S. A. S. (2020). Dampak kompetensi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa kecamatan Rambutan Banyuasin.
- Rahman, R. F. (2020). Evaluasi Atas Implementasi Audit Internal, Pengendalian Internal, Dan Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Survey Pada Pt. X Kantor Wilayah Bandung).

- Rosidah, I. , K. P. , & R. R. B. (2023). *Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey)*.
- Rusli, A. (2024). *Sistem pengendalian internal berbasis risiko*. Minhaj Pustaka.
- Sari, E. W. , A. N. , & J. J. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan gaya kepemimpinan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syahril, S., Sudirman, R., & Rusli, A. (2023). Menelusuri fungsi internal audit dan sistem pengendalian internal Universitas Muhammadiyah Palopo. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1-12. [https://doi.org/\[DOI-placeholder\]](https://doi.org/[DOI-placeholder])
- Watu, D., Londa, Y., Sayang, S., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi, F. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. In *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* (Vol. 4, Issue 2).
- Zulfa Wafirotin, K., & Septiviasuti, U. (2019). Ekuilibrium the effect of transparency, community participation, and accountability on management of village funds in ponorogo regency. 14, 31–44.